

**LAPORAN KEUANGAN *UNAUDITED* UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018 TAHUN ANGGARAN 2024**

**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024**



Jalan Kaharudin Nasution No.341 Km.10 Pekanbaru Riau

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai





D. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.
NIP. 197407312003122001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.
NIP. 197407312003122001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Audited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama Semester II dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.167,546,968 atau mencapai 164% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.102,341,000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.8.069.299.501 atau mencapai 95% dari alokasi anggaran sebesar Rp.8.523.761.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II Tahun 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.50,850,767,575 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.46,083,425.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.50,850,544,876; Piutang jangka panjang lainnya sebesar Rp.52,352,675; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.24,629,441 dan Rp.50,826,138,134.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.104,764,268 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.-8,188,523,202. sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp.8.083,758,934. Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp.17.460,000. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp.8,130,941,662. Surplus/defisit-LO sebesar Rp.8,130,941,662.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.18,141,670,518. ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-8,130,941,662. transaksi antar entitas Rp.41,638,343,498, kemudian kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.32,209,164,992 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.50,350,835,510.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	102,341,000	167,546,968	65,205,968	164	44,808,000	72,452,268	(27,644,268)	162
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	102,341,000	167,546,968	65,205,968	164	44,808,000	72,452,268	(27,644,268)	162
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	102,341,000	167,546,968	65,205,968	164	44,808,000	72,452,268	(27,644,268)	162
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,523,761,000	8,069,299,501	(454,461,499)	95	7,656,473,000	7,424,612,543	231,860,457	97
1. Belanja Pegawai	4,054,727,000	3,983,779,779	(70,947,221)	98	4,120,062,000	4,111,598,103	8,463,897	100
2. Belanja Barang	4,265,034,000	3,882,065,827	(382,968,173)	91	3,456,061,000	3,233,120,055	222,940,945	94
3. Belanja Modal	204,000,000	203,453,895	(546,105)	100	80,350,000	79,894,385	455,615	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,523,761,000	8,069,299,501	(454,461,499)	95	7,656,473,000	7,424,612,543	231,860,457	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

II. NERACA

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
			2024	2023	Jumlah	%
1			2	3	4	5
ASET						
ASET LANCAR						
Piutang Bukan Pajak			311,693,115.	265,378,115	46,315,000	17.45
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak			(265,609,690.)	(265,378,115)	(231,575)	0.09
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)			46,083,425.	0	46,083,425	0.00
JUMLAH ASET LANCAR			46,083,425.	0	46,083,425	#NUM!
ASET TETAP						
Tanah			41,285,724,520.	8,401,276,000	32,884,448,520	391.42
Peralatan dan Mesin			12,590,538,665.	12,826,412,665	(235,874,000)	(1.84)
Gedung dan Bangunan			10,508,801,774.	10,722,630,434	(213,828,660)	(1.99)
Jalan, Irigasi dan Jaringan			628,459,527.	628,459,527	0	0.00
Aset Tetap Lainnya			40,001,000.	40,001,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan			142,880,000.	0	142,880,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN			(14,391,721,336.)	(14,522,313,695)	130,592,359	(0.90)
JUMLAH ASET TETAP			50,804,684,150.	18,096,465,931	32,708,218,219	180.74
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Piutang Jangka Panjang lainnya			52,352,675.	54,352,675	(2,000,000)	(3.68)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya			(52,352,675.)	(54,352,675)	2,000,000	(3.68)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			0.	0	0	#NUM!
ASET LAINNYA						
Aset Lain-lain			0.	75,949,028	(75,949,028)	(100.00)

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0.	(6,115,000)	6,115,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0.	69,834,028	(69,834,028)	(100.00)
JUMLAH ASET	50,850,767,575.	18,166,299,959	32,684,467,616	179.92
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	24,629,441.	24,629,441	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24,629,441.	24,629,441	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	24,629,441.	24,629,441	0	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	50,826,138,134.	18,141,670,518	32,684,467,616	180.16
JUMLAH EKUITAS	50,826,138,134.	18,141,670,518	32,684,467,616	180.16
JUMLAH EKUITAS	50,826,138,134.	18,141,670,518	32,684,467,616	180.16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50,850,767,575	18,166,299,959	32,684,467,616	179.92

III. LAPORAN OPERASIONAL

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	#NUM!
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	#NUM!
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	#NUM!
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	#NUM!
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	105,678,836.	52,392,268.	53,286,568.	101.707
Pendapatan Badan Layanan Umum	0.	0.	0.	#NUM!
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	105,678,836.	52,392,268.	53,286,568.	101.707
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	#NUM!
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	#NUM!
Jumlah Pendapatan	105,678,836.	52,392,268.	53,286,568.	101.707
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Pegawai	3,983,779,779.	4,111,598,103.	(127,818,324.)	(3.109)
Beban Persediaan	19,844,708.	123,072,150.	(103,227,442.)	(83.876)
Beban Barang dan Jasa	2,434,664,778.	2,026,074,234.	408,590,544.	20.167
Beban Pemeliharaan	751,541,795.	486,445,478.	265,096,317.	54.497
Beban Perjalanan Dinas	682,664,546.	623,203,809.	59,460,737.	9.541
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0.	0.	0.	#NUM!

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Subsidi	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Hibah	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Penyusutan dan Amortisasi	577,023,397.	979,360,311.	(402,336,914.)	(41.082)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,768,425.)	197,533,565.	(199,301,990.)	(100.895)
Beban Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	#NUM!
JUMLAH BEBAN	8,447,750,578.	8,547,287,650.	(99,537,072.)	(1.165)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,342,071,742.)	(8,494,895,382.)	152,823,640.	(1.799)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	#NUM!
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(154,280,428.)	0.	(154,280,428.)	#NUM!
Pendapatan Pelepasan Aset	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Pelepasan Aset	154,280,428.	0.	154,280,428.	#NUM!
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	#NUM!
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	#NUM!
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	692,097,700.	17,460,000.	674,637,700.	3,863.904
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	692,097,700.	17,460,000.	674,637,700.	3,863.904
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	#NUM!
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	537,817,272.	17,460,000.	520,357,272.	2,980.282
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,804,254,470.)	(8,477,435,382.)	673,180,912.	(7.941)
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	#NUM!
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	#NUM!
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	#NUM!
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,804,254,470.)	(8,477,435,382.)	673,180,912.	(7.941)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,141,670,518.	19,266,945,625.	(1,125,275,107.)	(5.84)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,805,563,963.)	(8,477,435,382.)	671,871,419.	(7.93)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,148,706,844.)	0.	(1,148,706,844.)	0.
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	0.	0.	0.
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,148,706,844.)	0.	(1,148,706,844.)	0.
LAIN-LAIN	0.	0.	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	41,638,343,498.	7,352,160,275.	34,286,183,223.	466.34
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	32,684,072,691.	(1,125,275,107.)	33,809,347,798.	(3,004.54)
EKUITAS AKHIR	50,825,743,209.	18,141,670,518.	32,684,072,691.	180.16

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasutoin Km.10 N0.341 Pekanbaru, Melalui peran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Visi

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau berkomitmen dengan visi “menjadi lembaga pemerintah dalam rangka standardisasi produksi pertanian di Propinsi Riau”.

Misi

- a) Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik Balai sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b) Mengembangkan jejaring kerjasama di daerah dan nasional dalam rangka peningkatan kapasitas pengkajian, pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
- c) Melaksanakan pengkajian sesuai norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian.
- d) Mengembangkan SDM yang profesional dan mandiri.

Sasaran

Sasaran dari tujuan “Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian unggulan spesifik Balai mendukung terwujudnya pertanian industrial berbasis sumberdaya Balai adalah:

- a) Tersedianya inovasi pertanian unggulan spesifik Balai sesuai kebutuhan pengguna.
- b) Meningkatkan penyebaran (diseminasi) inovasi pertanian unggulan spesifik Balai sesuai kebutuhan pengguna.

Sasaran dari tujuan “Meningkatkan manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian serta mengembangkan jejaring kerjasama regional, nasional dan

internasional” adalah:

1. Meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian
2. Meningkatnya kerjasama regional, nasional dan internasional (di bidang pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satker saat ini. Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah, SAKTI juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh SPAN. Tujuan diterapkannya SAKTI yaitu untuk memodernisasikan pengelolaan keuangan anggaran ditingkat Satker K/L dengan menggabungkan beberapa aplikasi dalam satu aplikasi dan dalam single data base agar lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Modul-modul dalam SAKTI antara lain:

1. Modul Administrator: untuk mengelola data referensi, data user, user manual, dan DB SAKTI.
 2. Modul Penganggaran, untuk menyusun RKA-KL.
 3. Modul Komitmen, untuk pencatatan data perikatan/kontrak, pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Output: ADK Supplier dan ADK Kontrak;
 4. Modul Pembayaran, untuk memproses Resume Tagihan (SPP) dan SPM. Output: Dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan;
 5. Modul Bendahara, untuk proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara. Output: LPJ Bendahara;
 6. Modul Persediaan, untuk menangani pengelolaan barang persediaan Output: Laporan Persediaan;
 7. Modul Aset Tetap, untuk pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Output: Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan; dan
 8. Modul Pelaporan, untuk keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Output: Laporan Operasional, LPE, Neraca, dan LRA.
3. Proses penyusunan LPJ Bendahara hingga melaksanakan rekonsiliasi melalui aplikasi SPRINT yaitu melakukan finalisasi pembukuan bendahara bulanan di SAKTI sampai dengan perekaman nilai LPJ yang benar, lalu melakukan download ADK LPJ di mon_sakti (http://intra.djpbk.kemenkeu.go.id/modul/mon_sakti/) untuk selanjutnya diunggah melalui aplikasi SPRINT sebagai media pelaporan ADK LPJ ke KPPN (Kuasa BUN).
4. Proses koneksi antara SPAN dengan SAKTI adalah suatu interkoneksi antara SPAN dengan SAKTI yang akan terjadi secara intensif, berupa pertukaran/ komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN. Interkoneksi difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara Satker dan KPPN untuk menerima dan mengirim data dari SPAN. Jembatan-jembatan komunikasi antara SPAN dan SAKTI meliputi :
- a. PORTAL SPAN, adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan implementasi SPAN. Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang

mendukung SAKTI, dimana lalu lintas ADK ke/dari SPAN dilakukan melalui Portal SPAN. User dapat memanfaatkan fasilitas portal ini setelah terlebih dahulu melakukan login dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar.

- b. SPAN SMS, yaitu sistem layanan informasi SPAN berbasis Short Message Service sebagai pendukung dan pelengkap portal SPAN dalam menjembatani Satuan Kerja dengan SPAN. Penggunaanya adalah Administrator sebagai pengelola server SPAN SMS, KPPN sebagai operator local, dan Satker sebagai pengguna layanan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun

Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN				ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
					PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
2				3	4	5	6=4-5	7=6/3
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK								
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan								
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan				69,581,000.	84,648,500.	0.	84,648,500.	121.65
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				7,920,000.	9,891,768.	0.	9,891,768.	124.9
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251				77,501,000.	94,540,268.	0.	94,540,268.	121.99
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum								
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya				24,840,000.	10,224,000.	0.	10,224,000.	41.16
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252				24,840,000.	10,224,000.	0.	10,224,000.	41.16
Pendapatan Lain-Lain								

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.	58,782,700.	0.	58,782,700.	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0.	4,000,000.	0.	4,000,000.	0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0.	62,782,700.	0.	62,782,700.	#NUM!
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	102,341,000.	167,546,968.	0.	167,546,968.	163.71
JUMLAH PENDAPATAN	102,341,000.	167,546,968.	0.	167,546,968.	163.71

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.167,546,968 atau mencapai 163,71% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.102,341,000

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp.8,069,299,501 atau 95% dari Anggaran belanja sebesar Rp.8,523,761,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4,054,727,000	3,983,779,779	98
Belanja Barang	4,265,034,000	3,882,065,827	91
Belanja Modal	204,000,000	203,453,895	100
Total Belanja	Rp.8,523,761,000	Rp.8,069,299,501	95

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4,054,727,000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4,265,034,000 sedangkan Realisasi belanja barang 31 Desember 2023 sebesar Rp.3,882,065,827

**Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,047,983,977	1,024,056,070	1.02
Belanja Barang Non Operasional	634,839,173	673,498,525	-0.9
Belanja Barang Persediaan	123,102,150	82,607,477	1.49
Belanja Jasa	317,575,468	275,999,015	1.15
Belanja Pemeliharaan	486,415,478	477,085,557	1.01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	623,513,809	480,171,889	1.29
Jumlah Belanja Kotor	3,233,430,055	3,013,418,533	1,07
Pengembalian Belanja Barang	310.000	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,265,034,000	3,013,418,533	1,07

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.203,453,895 dan Rp.79,894,385.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	79.894.385.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203,453,895	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	203,453,895	79.894.385.00	32,45
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	203,453,895	79.894.385.00	32,45

B.4.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.79,894,385.00

**Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	79.894.385.00	0.00

Jumlah Belanja Kotor		79.894.385.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	79.894.385.00	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp.311,693,115 dan Rp.265,378,115. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	311,693,115	265,378,115
Jumlah	311,693,115	265,378,115

Piutang bukan pajak sebesar Rp.265,378,115 per 31 Desember 2024 berupa Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2019, yaitu pembuatan gedung bangunan Kebun percobaan Siak. Telah dibuatkan Surat Ketetapan dan Surat Penagihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.OS/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa pengakuan piutang bukan pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak.

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-265,609,690 dan Rp.-265,378,115.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing masing debitur. Rincian penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Piutang bukan pajak

Piutang bukan pajak adalah sebesar Rp.45,688,500. yang merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti yang dibayarkan setiap bulannya selama tahun 2024.

C.2. ASET TETAP**C.2.1. Tanah**

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.41,285,724,520 dan Rp.8,401,276,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.12,590,538,665 dan Rp.12,826,412,665.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10,508,801,774 dan Rp.10,722,630,434.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	
Mutasi Tambah	
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	229,832,000.00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	67,262,973.00
Koreksi BMN ditemukan Kembali	200,023,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-1,096,588,000.00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-8,111,000.00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-1,261,285,973.00
Saldo per 31 Desember 2024	10,508,801,774

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.628,459,527.00 dan Rp.628,459,527.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	518,907,527
Mutasi Tambah	
Koreksi Kesalahan input IP	109,552,000

Saldo per 31 Desember 2024	628,459,527
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-223,552,850
Nilai Buku per 31 Desember 2024	404,906,677

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.40,001,000.00 dan Rp.40,001,000.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-14,391,721,336 dan Rp.-14,522,313,695.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.75,949,028.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.-6,115,000.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	0.00	75,949,028.00	75,949,028.00
Jumlah		0.00	75,949,028.00	75,949,028.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24,629,414 dan Rp.24,629,414. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan SPM operasional pemeliharaan kantor Bulan Desember 2024. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada pihak ketiga	24,629,414.00	24,629,414.00
Jumlah	24,629,414.00	24,629,414.00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.50,825,743,209 dan Rp.18,141,670,518. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.105,678,836 dan Rp.52,392,268. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	86,648,500	38,800,000
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	10,431,336	11,547,268
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya	10,224,000	2,045,000
Pendapatan jasa lainnya	375,000	0.00
Jumlah	105,678,836	52,392,268

D.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,983,779,779 dan Rp.4,111,598,103. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	
Beban Gaji Pokok PNS	2,724,433,400	2,694,400,400	
Beban Pembulatan Gaji PNS	39,065	33,643	
Beban Tunj. Anak PNS	58,019,406	56,246,608	
Beban Tunj. Beras PNS	135,859,920	144,912,420	
Beban Tunj. Fungsional PNS	317,850,000	413,855,000	-48,2
Beban Tunj. PPh PNS	36,179,034	18,900,792	-59,9

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	24,660,000	23,4
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	194,019,200	187,566,240	-10,9
Beban Tunjangan Umum PNS	31,540,000	42,660,000	-13
Beban Uang Lembur	123,646,000	119,229,000	-18,3
Beban Uang Makan PNS	337,392,000	409,134,000	4,5
Jumlah	3,983,779,779	4,111,598,103	-3,19

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19,844,708 dan Rp.123,072,150. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	19,844,708	123,072,150	-83,876
Jumlah		123,072,150	-83,876

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2,434,664,778 dan Rp.2,026,074,234. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.751,541,795 dan Rp.486,445,478. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	404,773,681	191,630,400	46,78
Beban Pemeliharaan Jaringan	0.00	940,000	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	324,120,114	293,845,078	7,8
Beban Pemeliharaan lainnya	15,998,000	0.00.	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6,650,000	0.00	0.00
Jumlah	751,541,795	486,445,478	54,497

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.682,664,546 dan Rp.623,203,809. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	569,274,546	567,113,809	1,322
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,390,000	56,090,000	8,921
Jumlah	682,664,546	623,203,809	9,541

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.577,023,397

dan Rp.979,360,311. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Perbandingan Beban penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan Mesin	240,514,489	332,387,810	-5,32
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321,924,829	167,098,513	-50
Beban Penyusutan jaringan	14,584,079	9,129,333	-50
Jumlah	515,907,695	1,173,611,373	-56,04

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-1,373,500 dan Rp.197,533,565.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Semester II per 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp.537,817,272 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.17,460,000.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.18,141,670,518 dan Rp.19,266,945,625.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.-7,804,649,395 dan Rp.-8,477,435,382. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-1,148,706,844 dan Rp.0.00

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi nilai aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-1,148,706,844 dan Rp.0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi

E.3.2. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.41,637,428,930 dan Rp.7,352,160,275 . Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp.50,825,743,209. dan Rp.18,604,573,134.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA